



## PERLUASAN DAN PEMERATAAN AKSES PENDIDIKAN AGAMA DAN KEAGAMAAN DI KABUPATEN DONGGALA SULAWESI TENGAH

Mujizatullah

Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar  
e-mail : mujizatullah28@gmail.com

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan program-program pembangunan dan rehabilitasi sarana fisik yang disasarkan kepada madrasah, program-program peningkatan kesejahteraan guru yang disasarkan kepada madrasah, program-program bantuan dana pendidikan siswa yang disasarkan kepada madrasah, perkembangan daya tampung madrasah selama dan pasca implementasi ketiga program yang disebut terdahulu. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara kepada Kepala Seksi Mapenda dan Peka Pontren, Tokoh Pendidikan di Palu. Kebijakan pemerintah daerah tentang perluasan dan pemerataan akses pendidikan agama dan keagamaan islam di daerah tertinggal telah terimplementasi meliputi peningkatan sarana fisik, penambahan ruang kelas, rehabilitasi gedung yang telah mengalami peningkatan namun belum merata terutama pada pendidikan keagamaan, kebijakan peningkatan kesejahteraan guru belum terealisasi serta pemberian beasiswa kepada siswa yang berprestasi dan tidak mampu belum merata. Akses perluasan dan pemerataan daya tampung satuan pendidikan agama islam dan keagamaan telah menunjukkan adanya peningkatan daya tampung siswa di madrasah ditandai dengan bertambahnya jumlah siswa setiap tahun namun belum maksimal.

**Kata Kunci** : Akses Perluasan Pemerataan, Pendidikan Agama, Keagamaan, Palu.

### Abstract

*This study aims to describe programs for the development and rehabilitation of physical facilities targeted at madrasahs, teacher welfare improvement programs targeted at madrasahs, student funding support programs targeted at madrasahs, development of madrasah capacity during and post-implementation of the third the former program. This research is qualitative research. The data were collected through interviews to Section Head of Mapenda and Peka Pontren, Educational Leaders in Palu. Local government policy on the expansion and equitable access of religious and religious education of Islam in disadvantaged areas has been implemented including physical infrastructure improvement, classroom addition, rehabilitation of buildings that have been increasing but not evenly distributed, especially in religious education, policies on improving the welfare of teachers have not been realized as well as the provision of scholarships to students who are achievers and can not afford not evenly. Access to the extent and equal distribution of Islamic religious and religious education units has shown an increase in the capacity of students in madrasah marked by increasing number of students each year but not maximized.*

**Keywords**: Access Equity Expansion, Religious Education, Religious, Palu.

### 1. PENDAHULUAN

Pemerataan pendidikan menjadi salah satu cita-cita bangsa. Berbagai undang-undang disahkan dan dana dialokasikan untuk cita-cita itu. Dalam UUD 1945 dinyatakan bahwa pemerintah berkewajiban untuk memenuhi hak setiap warga negara dalam memperoleh layanan pendidikan guna meningkatkan kualitas hidup bangsa indonesia. Sejak tahun 1984, pemerintah indonesia secara formal mengupayakan pemerataan pendidikan sekolah dasar, dilanjutkan dengan wajib belajar pendidikan sembilan tahun mulai tahun 1994. garis-garis besar haluan negara tahun 1999-2004 (TAP MPR No.IV/MPR/199)

mengamanahkan antara lain : mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan bermutu tinggi bagi seluruh rakyat indonesia menuju terciptanya manusia indonesia yang berkualitas tinggi dengan peningkatan anggaran pendidikan secara berarti.

Sejalan dengan itu UU No.20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa “setiap warga negara mempunyai hak sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu” dan pasal 11 ayat (1) menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang



bermutu bagi setiap warga negaratanpa diskriminasi, kemudian secara operasional pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dirumuskan dalam kebijakan pembangunan di bidang pendidikan pada tahun 2007 yang mencakup : pemerataan dan perluasan akses pendidikan, peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing, dan peningkatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan.

Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional menegaskan bahwa strategi pertama dalam melaksanakan pembaruan sistem pendidikan nasional adalah “pelaksanaan pendidikan agama dan akhlak mulia”. oleh karenanya pendidikan keagamaan jelas merupakan salah satu pilar utama untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional yang dirumuskan dalam pasal 3 UU nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. hal tersebut menyiratkan arti pentingnya pendidikan agama dan keagamaan dalam sistem pendidikan nasional.

Berdasarkan tiga kebijakan pembangunan pendidikan diatas maka Departemen Agama RI dalam hal ini Ditjen pendidikan Islam 2004-2009 mengarahkan kebijakan pembangunan Pembangunan Pendidikan Islam dalam rencana Strategis (Renstra) Ditjen Pendidikan Islam dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2004-2009 bidang pendidikan kepada tiga kebijakan. Tiga kebijakan tersebut terdiri dari : (1) perluasan dan pemerataan akses, ditujukan kepada upaya perluasan daya tampung satuan pendidikan islam dengan mengacu kepada skala prioritas nasional dengan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh peserta didik dari berbagai golongan masyarakat yang berbeda baik secara sosial ekonomi, gender, lokasi tempat tinggal dan tingkat kemampuan intelektual serta kondisi fisik. (2). peningkatan mutu, relevansi dan daya saing diarahkan pada peningkatan mutu pendidikan islam sehingga dapat memenuhi standar nasional pendidikan (SNP) dan (3) peningkatan tata kelola dan pencitraan yang diarahkan pada pembenahan perencanaan jangka menengah dengan menetapkan kebijakan strategis serta program-program yang berdasarkan skala prioritas. Sesuai arah

kebijakan tersebut maka perlu dilakukan kajian evaluasi untuk memastikan tingkat keberhasilan dari implementasi kebijakan pembangunan pendidikan agama, terutama pada kebijakan pemerataan dan perluasan akses pendidikan agama.

Berdasarkan uraian pada latar belakang maka dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut : Bagaimana implementasi kebijakan nasional tentang perluasan dan pemerataan akses pendidikan pada bidang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan di Kabupaten Donggala , Bagaimana peningkatan daya tampung madrasah setelah implementasi kebijakan nasional tentang perluasan dan pemerataan akses pendidikan agama dan pendidikan keagamaan di Kabupaten Donggala. Penelitian ini bertujuan untuk Menemukan program-program pembangunan dan rehabilitasi sarana fisik yang disasarkan kepada madrasah, Menemukan program-program peningkatan kesejahteraan guru yang disasarkan kepada madrasah, Menemukan program-program bantuan dana pendidikan siswa yang disasarkan kepada madrasah, Menemukan perkembangan daya tampung madrasah selama dan pasca implementasi ketiga program yang disebut terdahulu.

Penelitian ini diharapkan bermanfaat pada Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara teoritis pada pengembangan ilmu pengetahuan khususnya pada bidang kependidikan. kebijakan di bidang pendidikan, secara teoritis dapat mendapat sumbangsi dalam rangka memperkaya fenomena keilmuan khususnya pada ilmu kebijakan pendidikan, Hasil penelitian ini diharapkan pula bermanfaat praktis pada perbaikan kebijakan pendidikan di Indonesia. kebijakan nasional di bidang pendidikan mencakup tiga kebijakan strategi salah satunya adalah perluasan dan pemerataan akses pendidikan agama. Karenanya hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam upaya memperbaiki manajemen implementasi kebijakan tersebut.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada



Bab I tentang ketentuan umum pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa : pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan mendefinisikan bahwa Pendidikan agama adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran/kuliah pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Pendidikan keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya. Pendidikan diniyah adalah pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan pada semua jalur dan jenjang pendidikan. Pesantren atau pondok pesantren adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam berbasis masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan diniyah atau secara terpadu dengan jenis pendidikan lainnya.

Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2007, Pendidikan Formal, Non Formal dan Informasi sebagai sebuah sistem. Sistem merupakan sehimpunan komponen atas subsistem yang terorganisasikan dan berkaitan sesuai rencana untuk mencapai suatu tujuan tertentu. (Tatang Amirin, 1992:11). pendidikan formal yang sering disebut pendidikan persekolahan, berupa rangkaian jenjang pendidikan yang telah baku misalnya, SD,SMP,SMA dan PT. Pendidikan nonformal lebih difokuskan pada pemberian keahlian atau skill guna terjun ke masyarakat. Pendidikan informal adalah suatu fase pendidikan yang berada disamping pendidikan formal dan informal. Formal, nonformal dan informal ketiganya hanya dapat dibedakan tetapi sulit dipisahkan karena

keberhasilan pendidikan dalam arti terwujudnya keluaran pendidikan yang berupa sumber daya manusia sangat bergantung kepada sejauh mana ketiga subsistem tersebut berperan.

Pendidikan agama islam dan keagamaan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 tentang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan. Pendidikan agama Islam adalah merupakan suatu program pemerintah yang memerlukan suatu lembaga untuk mengajarkan agama islam pada madrasah dan sekolah umum. Pendidikan agama berfungsi memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan, peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran pada semua jalur jenjang jenis pendidikan dan membentuk manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia dan mampu menjaga kedamaian dan kerukunan hubungan inter dan antarumat beragama.

Kurikulum pendidikan agama dilaksanakan sesuai dengan standar nasional pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan peserta didik dalam memahami,menghayati dan mengamalkan nilai agama yang menyesuaikan penguasaannya dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. (Nata, 1997 : 123)

Pendidikan keagamaan Islam adalah berbentuk pendidikan diniyah dan pesantren yang mempersiapkan peserta didik untuk menjadi ahli agama, penyelenggaraannya bersumber dari ajaran agama yang memadukan ilmu agama dan umum /keterampilan untuk mempersiapkan peserta didik pindah pada jenjang yang sama atau melanjutkan ke pendidikan umum.

Pendidikan diniyah nonformal diselenggarakan dalam bentuk pengajian kitab dalam rangka mendalami ajaran islam,majelis taklim,kurikulum majelis taklim bersifat terbuka dengan mengacu pada pemahaman terhadap alquran dan hadits sebagai dasar untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT serta akhlak mulia.dilaksanakan di masjid,mushalla atau tempat lain yang memenuhi syarat. Oleh karena itu pendidikan agama di Indonesia



perlu ditingkatkan hingga ke pelosok negeri dan bagi masyarakat menengah ke bawah (Utomo tjipto, Ruijter Kes1991).

Perluasan dan pemerataan pendidikan mencakup dua aspek penting yaitu equality dan equity. equality atau persamaan mengandung arti persamaan kesempatan untuk memperoleh pendidikan, sedangkan equity bermakna keadilan dalam memperoleh kesempatan pendidikan yang sama diantara berbagai kelompok dalam masyarakat. Hal ini sesuai dengan pendapat Siswoyo mengenai Pengertian perluasan dan pemerataan akses pendidikan ditujukan kepada upaya perluasan daya tampung satuan pendidikan islam. (Siswoyo, Dwi, dkk.: 2013). akses terhadap pendidikan agama yang merata berarti semua penduduk usia sekolah telah memperoleh kesempatan pendidikan, agama sementara itu akses terhadap pendidikan telah adil jika antar kelompok bisa menikmati pendidikan agama secara sama. Peningkatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan berdasarkan pendapat mengenai Kebijakan Pendidikan Era Otonomi Daerah (Sam Tuti T, Chan Sam M.: 2006).

Untuk peningkatan kapasitas daya tampung dengan program perluasan dan pemerataan pembangunan pendidikan agama Islam pada MI, MTS dan MA : Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan agama termasuk sarana olahraga termasuk rehabilitasi bangunan, pengadaan unit sekolah baru, penambahan ruang kelas baru, sarana ibadah, perpustakaan, laboratorium, sarana olah raga, Memberikan subsidi pendidikan bagi sekolah negeri dan swasta agar mampu menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dan memberikan pelayanan pendidikan agama Islam yang dapat dijangkau masyarakat luas dalam hal ini masyarakat di daerah tertinggal. Pendapat tersebut sejalan dengan pendapat Eka, R mengenai : Peningkatan kesejahteraan guru dengan memberikan tunjangan kepada guru daerah tertinggal. (Eka, R.2007).

Data kementerian perencanaan pembangunan nasional/badan perencanaan pembangunan nasional (bappenas) dari rangkuman rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) tahun 2010-2014 prioritas bidang kawasan daerah

tertinggal menunjukkan bahwa terdapat 183 kabupaten tertinggal di Indonesia, 10 kabupaten di Sulawesi Tengah diantaranya donggala.

### 3. METODE PENELITIAN

Penelitian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif yang berusaha untuk menghasilkan data deskriptif, gambaran yang sistematis, faktual serta akurat mengenai fakta-fakta di lapangan serta hubungan antara fenomena yang diamati dan dianalisis dengan pendekatan kualitatif dan hasil analisis ini akan dijelaskan dengan kalimat-kalimat yang dideskripsikan dan berusaha sedapat mungkin memberikan kejelasan obyek dan subyek penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Donggala yang masuk dalam daftar 183 daerah tertinggal pada tahun 2013 yaitu Donggala yang berada di urutan 107. Penentuan informan. Informan yang merupakan orang-orang yang dianggap memiliki pengetahuan tentang materi dan aspek yang akan diteliti para informan terdiri atas : Kakanwil Kementerian Agama, Kandepag Agama (Kasi Mapenda dan peka pontren), Tokoh pendidikan agama Islam. Sumber Data dan Pengumpulan Data. Data yang diperoleh dibagi dalam dua segmen yaitu data primer dan data sekunder. data primer adalah data yang didasarkan pada kenyataan obyektif terhadap fokus penelitian yaitu potret perluasan pemerataan akses pendidikan agama Islam bagi masyarakat di daerah tertinggal. data sekunder adalah data yang telah diolah yang dapat diperoleh pada kantor pemerintahan, lembaga pendidikan keagamaan dan sejenisnya. Data primer diteliti dengan menggunakan teknik wawancara mendalam sebagai upaya untuk mendapatkan gambaran utuh mengenai fenomena yang sedang diteliti. observasi digunakan untuk mengamati perluasan dan pemerataan akses pendidikan agama Islam dan keagamaan pada lokasi yang diteliti.

Analisis data. Pengolahan dan analisis data dilakukan dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari seluruh sumber yaitu hasil wawancara, catatan yang didapatkan di lapangan, dokumen, gambar, foto dan lain-lain. kemudian mereduksi data selanjutnya



menyusun kedalam satuan-satuan lalu dikategorisasi dalam tulisan deskriptif.

#### 4. PEMBAHASAN

##### Profil Kabupaten Donggala

Wilayah Donggala merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah yang beribu kota di Bonawa, daerah ini berbatasan dengan kabupaten tolitoli di utara, Provinsi Sulawesi selatan di selatan, Selat makassar di barat, kabupaten marigi moutong di timur. secara administratif daerah ini terbagi menjadi 21 kecamatan. daerah ini mempunyai potensi yang besar untuk dikembangkan antara lain disektor pertanian dengan komoditi yang dihasilkan berupa kakao, kelapa dalam, kopi robusta, cengkeh, lada, jambu mete, dan cengkeh. untuk kegiatan pertanian di daerah ini hasil pertanian yang utama berupa bahan tanaman pangan berupa padi, tanaman hortikultura dan palawija. tanaman bahan pangan tentunya dengan padi sebagai primadona disamping jagung, kacang-kacangan, dan umbi-umbian menjadi ujung tombak kegiatan ekonomi secara keseluruhan. dulu donggala dikenal sebagai kota pelabuhan dan perdagangan, lalu lintas barang dan jasa hanya bisa berlangsung melalui pelabuhan donggala di kecamatan banawa, dari waktu ke waktu kegiatan ekonomi terutama perdagangan dan pemerintahan kenyataannya lebih tersedot di kota palu, bekas ibukotakabupaten yang kini masih berstatus ibukota provinsi, walaupun masih berfingsi pelabuhan barang, pelabuhan donggala kalah ramai dibanding pelabuhan pantolan di palu. Di sektor pertambangan kabupaten donggala ini mempunyai potensi bahan tambang berupa emas, sirtu, kerikil alam, batu pecah, pasir alam, batu pondasi, dengan sirtu sendiri boleh dibilang terdapat hampir disemua kecamatan terutama di wilayah pantai barat. Secara garis besar kondisinya terbagi tiga yaitu pantai barat, pantai timur, dan lembah palu. Di pantai barat mencakup banawa, sindue, sirenja, balaesang, damsol dan sojol. dengan jumlah penduduk miskin 31,6%.

##### Jumlah Madrasah Perkabupaten/Kota.

Kabupaten Donggala mempunyai 42 RA, Madrasah Ibtidaiyah 1 negeri dan 17 swasta, Madrasah Tsanawiyah 3 negeri dan 15 swasta,

Madrasah Aliyah 0 negeri dan 8 swasta. (Sumber data Seksi Mapenda Kementerian Agama Sulawesi Tengah 2015).

Data diatas adalah gambaran pendidikan agama yang terdiri dari jenis dan jumlah sekolah/madrasah yang berada pada sepuluh kabupaten dan satu kota palu. sepuluh kabupaten ini sebagian berada pada daerah/wilayah pulau-pulau dan sebagian berada semua lancar, masih banyak daerah terpencil dan terisolir yang sulit dijangkau dalam jangka waktu yang singkat.

**Peningkatan sarana fisik.** Pada tahun 2013 untuk MI pembangunan kelas baru sebanyak 4 tahun 2015 sebanyak 8 kelas dan tahun 2015 menjadi 12 kelas. untuk penambahan sarana ibadah tahun 2013 mendapat 26 penambahan sarana ibadah, tahun 2014 mendapat 8 penambahan sarana ibadah dan tahun 2015 juga terdapat 10 penambahan sarana ibadah. untuk rehabilitasi sarana ibadah tahun 2013 mendapat 6 penambahan rehabilitasi sarana ibadah, tahun 2014 mendapat 8 penambahan rehabilitasi sarana ibadah dan tahun 2015 juga terdapat 10 penambahan rehabilitasi sarana ibadah. untuk perpustakaan tahun 2013 mendapat 5 perpustakaan, tahun 2014 mendapat 6 penambahan perpustakaan dan tahun 2015 juga terdapat 7 penambahan perpustakaan. untuk laboratorium tahun 2013 mendapat 6 penambahan laboartorium, tahun 2014 mendapat 4 penambahan laboratorium dan 2015 juga mendapat 8 penambahan laboratorium. untuk sarana olahraga tahun 2013 mendapat 4 penambahan sarana olahraga, tahun 2014 mendapat 5 penambahan sarana olahraga dan tahun 2015 terdapat 7 penambahan sarana olahraga.

Pada tahun 2013 untuk MTSN pembangunan kelas baru sebanyak 9 kelas, tahun 2014 sebanyak 11 kelas, dan tahun 2015 sebanyak 12 kelas. untuk penambahan sarana ibadah tahun 2013 mendapat 4 penambahan sarana ibadah, tahun 2014 mendapat 6 penambahan sarana ibadah dan tahun 2015 juga terdapat 8 penambahan sarana ibadah. untuk perpustakaan tahun 2013 mendapat 6 penambahan perpustakaan, tahun 2013 mendapat 5 penambahan perpustakaan dan tahun 2014 juga terdapat 7 penambahan perpustakaan. untuk laboratorium tahun 2013 mendapat 3 penambahan laboratorium, tahun





2014 mendapat 6 penambahan dan tahun 2015 mendapat juga 6 penambahan laboratorium. untuk sarana olahraga tahun 2013 mendapat 2 penambahan sarana olahraga, 2014 mendapat 8 penambahan sarana olahraga, tahun 2015 mendapat 10 penambahan sarana olahraga.

Pada tahun 2013 untuk **MAS** pembangunan kelas baru sebanyak 2 kelas tahun 2014 sebanyak 6 kelas dan tahun 2015 sebanyak 8 kelas. untuk penambahan sarana ibadah tahun 2013 mendapat 5 penambahan sarana ibadah, tahun 2014 mendapat 7 penambahan sarana ibadah dan tahun 2015 terdapat penambahan 9 sarana ibadah. untuk perpustakaan tahun 2013 mendapat 25 penambahan perpustakaan, tahun 2014 mendapat 8 penambahan perpustakaan dan tahun 2015 terdapat 10 penambahan perpustakaan. untuk laboratorium tahun 2013 mendapat 6 penambahan laboratorium, tahun 2014 mendapat 8 penambahan dan tahun 2015 terdapat 10 penambahan laboratorium. untuk sarana olahraga tahun 2013 mendapat 2 penambahan sarana olahraga, tahun 2014 mendapat 4 penambahan sarana olahraga dan 2015 terdapat 4 penambahan sarana olahraga. (Sumber data Kepala Seksi Mapenda Kementerian Agama Kab. Donggala tahun 2015).

Pada tahun 2013 untuk **pesantren** mendapat pembangunan kelas baru sebanyak 2 kelas tahun 2014 sebanyak 4 kelas, dan tahun 2015 sebanyak 6 kelas. untuk penambahan sarana ibadah tahun 2013 mendapat 3 penambahan sarana ibadah, tahun 2013 mendapat 4 penambahan dan tahun 2015 mendapat 6 penambahan sarana ibadah. Terlihat bahwa terjadi peningkatan dan rehabilitasi sarana pendidikan yang meliputi pembangunan ruang kelas baru dan sarana ibadah serta realisasi pembangunan laboratorium dan sarana olahraga yang sebelumnya belum ada hal ini menunjukkan adanya perluasan dan pemerataan sarana prasarana pendidikan. (Sumber data Kepala Seksi Peka Pontren Kementerian Agama Kab. Donggala tahun 2015)

**Peningkatan Kesejahteraan Guru,** Jumlah guru di madrasah negeri dan swasta kab. donggala. Tahun 2015 tunjangan khusus yang diberikan kepada guru pada madrasah

negeri di daerah tertinggal sebesar rp.1.300.000 tunjangan khusus untuk guru honorer rp.250.000. Implementasi kebijakan perluasan pemerataan pendidikan agama di kab. donggala selain peningkatan sarana fisik program lainnya adalah ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan guru. dari jumlah guru tersebut ditas jumlah guru non sebanyak 83%. Jumlah guru yang mendapatkan tunjangan kesejahteraan di daerah tertinggal perlu ditingkatkan karena sebagian besar madrasah berada di daerah pulau-pulau dan sebagian berada pada darata/dataran pegunungan yang jalur perhubungannya belum semua lancar sehingga guru merasa kesulitan untuk mengajar. (Sumber data Kepala Seksi Mapenda dan Peka Pontren Kementerian Agama Kab. Donggala tahun 2015).

**Pemberian beasiswa kepada peserta didik** yang berprestasi, Bantuan operasional sekolah (BOS) adalah program pemerintah yang berkelanjutan bertujuan untuk membebaskan beban biaya sekolah bagi siswa yang tidak mampu, terlebih di daerah tertinggal. program ini mulai terlaksana pada tahun 2007 sampai saat ini 2015 untuk tingkatan MIN/MIS dan MTSN/MTSS. jumlah dana BOS untuk MIN bersumber dari APBN sebesar 397 ribu/siswa setiap tahun dan jumlah dana bos yang bersumber dari pemerintah kab. donggala adalah 50 ribu/siswa setiap tahun. Pendidikan agama di kab. donggala rata-rata madrasah telah menerima bantuan baik MI, MTS, MA. diantaranya MIN labuan pada tahun 2013 sebanyak telah mendapat bantuan dana beasiswa sebanyak 19 orang untuk siswa. 2014 madrasah tersebut mendapat bantuan 26 orang, tahun 2015 mendapat bantuan 30 orang. MTSN labuan siswa yang bantuan beasiswa bagi siswa yang berprestasi dan tidak mampu pada tahun 2013 jumlahnya 21 orang, 2014 24 orang, tahun 2015 jumlahnya 28 orang. Pada tingkat MAS Muhammadiyah toaya pada tahun 2013 siswa yang mendapat bantuan beasiswa bagi siswa yang berprestasi dan tidak mampu 20, pada tahun 2014 16 orang, 2015 23 orang, tahun 2009 jumlahnya 27 orang (Sumber data Seksi Mapenda kementerian agama kab. donggala tahun 2015). Jumlah dana bos yang bersumber dari APBN (provinsi) yaitu sebesar 570 ribu/siswa setiap tahun dan dana BOS yang bersumber



dari pemerintah kab.donggala sebesar 55 ribu/siswa setiap tahun.selanjutnya untuk MTS jumlah dana BOS yang bersumber dari APBN provinsi yaitu sebesar 570 ribu per siswa setiap tahun dan dana BOS yang bersumber dari kab.donggala sebesar 55 ribu/siswa setiap tahun. Disisi lain MA belum mendapat bantuan operasional sekolah (BOS) untuk pendidikan keagamaan : Diniyah Takmiliah,Majelis Taklim ,TPA /TPQ mendapat bantuan dari pusat sebanyak rp.500.000/tahun. (Sumber data Kepala Seksi Mapenda Kementerian Agama Kab.Donggala tahun 2015 ).

**Peningkatan daya tampung** satuan pendidikan agama islam dan keagamaan di Kab.Donggala Kebijakan perluasan dan pemerataan akses pendidikan islam telah terjadi peningkatan yang cukup baik hingga tahun 2015 dan sampai saat ini melalui upaya sistematis tersebut diharapkan terjadi peningkatan dalam perluasan dan pemerataan pembangunan pendidikan agama islam pada MI,MTS,dan MA terhadap hal peningkatan sarana dan prasarana pendidikan agama termasuk rehabilitasi bangunan,pengadaan unit sekolah baru ,penambahan ruang kelas baru,sarana ibadah,perpustakaan,laboratorium dan sarana olahraga.Tingkat MTS terlihat perkembangan peningkatan daya tampung madrasah terus meningkat setiap tahun,pada tahun 2014-2015 jumlah siswa meningkat menjadi 50,38% pada tahun 2014-2015 jumlahnya meningkat 58% pada tahun 2014-2015 meningkat 68,9% dan pada tahun 2014-2015 jumlah siswa meningkat 35,4%.Peningkatan daya tampung pendidikan agama di MAS Kab.DonggalaTingkat MAS terlihat perkembangan peningkatan daya tampung madrasah terus meningkat setiap tahun,pada tahun 2014-2015 jumlah siswa meningkat menjadi 41%,pada tahun 2014-2015 jumlahnya meningkat 31,8% , pada tahun 2014-2015 meningkat 35,8% dan pada tahun 2014-2015 jumlah siswa meningkat 31,5%.Peningkatan daya tampung ini ditunjukkan dengan jumlah siswa yang memperoleh pendidikan agama madrasah baik tingkat dasar maupun menengah (MIS,MTSS dan MAS) terus mengalami peningkatan. Peningkatan ini disebabkan oleh adanya fasilitas layanan pendidikan yang memadai

termasuk penambahan ruang kelas,sarana ibadah,laboratorium dan sarana olahraga.dan dipengaruhi oleh kesadaran masyarakat dalam hal pendidikan agama dan keagamaan juga didorong oleh adanya peran kementerian agama kab.donggala dalam hal ini seksi mapenda dalam mensosialisasikan pendidikan agama.

Pendidikan diniyah informal yaitu pesantren yang telah terealisasi di daerah tertinggal pada 2014 dan terus mengalami perkembangan.pada tahun -2015 jumlah madrasah meningkat sebesar 33,3% pada tahun 2014-2015 jumlah madrasah meningkat 50% pada tahun 2014-2015 jumlah sekolah meningkat sebesar 16,7% dan tahun 2008-2009 jumlahnya meningkat 14,3%.(Sumber data Kepala Seksi Mapenda Kementerian Agama Kab.Donggala tahun 2015 ).

Peningkatan daya tampung pesantren terlihat terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.pada tahun 2014 ke tahun 2015 meningkat 6% jumlahnya menjadi 371,pada tahun 2014 ke 2015 meningkat 112,9%, jumlahnya menjadi 790 orang, tahun 2014ke 2015 meningkat 32,6% jumlahnya menjadi 1048 orang dan tahun 2014-2015 meningkat 27,7% jumlahnya menjadi 1338 orang.peningkatan jumlah santri ini selain dipengaruhi oleh kesadaran masyarakat dalam hal pendidikan agama islam dan kegamaan juga didorong oleh adanya peran ulama dan seksi pekapontren dan penamas pada kementerian agama. (Sumber data Kepala Seksi Peka Pontren Kementerian Agama Kab.Donggala tahun 2015 ).

Peningkatan daya tampung diniyah takmiliah awaliah terlihat terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.pada tahun 2014 ke tahun 2015 meningkat 24% jumlahnya menjadi 62 orang,pada tahun 2006 ke 2007 meningkat 14,5% jumlahnya menjadi 71 orang,tahun 2014 ke 2015 meningkat 16,9% jumlahnya menjadi 83 orang, dan tahun 2014-2015 meningkat 28,9% jumlahnya menjadi 107 orang.peningkatan daya tampung majelis taklim terlihat terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.pada tahun 2014-2015 meningkat 18,7% jumlahnya menjadi 730 orang,pada tahun 2014-2015 meningkat 7,5% jumlahnya menjadi 785



orang, tahun 2014 ke 2015 meningkat 6,6% jumlahnya menjadi 837 orang dan tahun 2014-2015 meningkat 3,9% jumlahnya menjadi 870 orang. Peningkatan daya tampung TPATPQ terlihat terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2014 ke tahun 2015 meningkat 17,7% jumlahnya menjadi 738 orang, pada tahun 2014 ke 2015 meningkat 14% jumlahnya menjadi 842 orang, tahun 2014 ke 2015 meningkat 8% jumlahnya menjadi 910 orang, 2008-2009 meningkat 12% jumlahnya menjadi 1020 orang. Peningkatan jumlah siswa ini selain dipengaruhi oleh kesadaran masyarakat dalam hal pendidikan agama Islam dan keagamaan juga didorong oleh adanya peran ulama dan pekapontren di kab. Donggala. (Sumber data Kepala Seksi Mapenda dan Peka Pontren Kementerian Agama Kab. Donggala tahun 2015).

Kesenjangan yang terjadi pada pemerataan dan perluasan akses pendidikan agama masih mendapat tantangan berat diantaranya masih sulitnya medan ditempuh karena masih banyaknya daerah yang masuk kategori terpencil yang sulit dijangkau transportasi darat. Di samping itu, peran serta masyarakat dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan kinerja pendidikan ditingkatkan melalui peran komite sekolah/satuan pendidikan dan dewan pendidikan. Untuk peningkatan efisiensi dan mutu layanan, diperlukan pengembangan kapasitas daerah serta penataan tata kelola pendidikan yang sehat dan akuntabel, baik pada tingkat satuan pendidikan maupun tingkat kabupaten/kota. Dalam kaitan itu, pemerintah daerah lebih berperan dalam mendorong otonomi satuan pendidikan melalui pengembangan kapasitas dalam pelaksanaan proses pembelajaran yang bermutu. (Wawancara Tokoh Pendidikan Agama Bapak Muslimin, Tahun 2015).

## 5. PENUTUP

Kebijakan pemerintah daerah tentang perluasan dan pemerataan akses pendidikan agama dan keagamaan Islam di daerah tertinggal telah terimplementasi meliputi peningkatan sarana fisik, penambahan ruang kelas, rehabilitasi gedung yang telah mengalami peningkatan namun belum merata

terutama pada pendidikan keagamaan, kebijakan peningkatan kesejahteraan guru belum terealisasi serta pemberian beasiswa kepada siswa yang berprestasi dan tidak mampu belum merata. Akses perluasan pemerataan daya tampung satuan pendidikan agama Islam dan keagamaan telah menunjukkan adanya peningkatan daya tampung siswa di madrasah ditandai dengan bertambahnya jumlah siswa setiap tahun namun belum maksimal.

Rekomendasi. Implementasi program kebijakan perluasan dan pemerataan pendidikan agama dan keagamaan perlu dilanjutkan dengan pemerataan peningkatan sarana dan prasarana fisik di madrasah, serta pembangunan sarana ibadah, laboratorium, olahraga dan perpustakaan terutama pada pendidikan keagamaan. Perlu dibentuk tim khusus dalam mengimplementasikan kebijakan perluasan dan pemerataan pendidikan agama dan keagamaan agar peningkatan daya tampung lebih merata.

## 6. REFERENSI

- Departemen Pendidikan Nasional, Undang-Undang RI No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) cet ,I ; Bandung : Fokus Media,2003),h.7/
- Dirjen Kelembagaan Islam, Direktorat Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren, Departemen Agama RI 2004, petunjuk Teknis Pondok Pesantren
- Eka, R.2007. Kondisi Pemerataan Pendidikan di Indonesia, (<http://edu-articles.com>, diakses 9 Maret 2009)
- Nata, Abudin. 1997. Filsafat Pendidikan Islam. Jakarta : PT. Logos Wacana Ilmu.
- Peraturan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 001/KEP/M-PDT/II/2005 tentang Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan





Renstra Dirjen Pendidikan Agama 2004-2009, Kebijakan Umum Bidang Madrasah dan Pendidikan Agama Islam (Mapenda tahun 2008).

Siswoyo, Dwi, dkk. 2013. *Ilmu Pendidikan*. Yogyakarta: UNY Press.

Sam Tuti T, Chan Sam M. 2006. *Kebijakan Pendidikan Era Otonomi Daerah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Sastradipoera Koemaruddin. 1989. *Kegunaan Konsep Gini dan Konsep Kesenjangan Pendidikan*. Bandung: Departemen

Pendidikan dan Kebudayaan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Tirtarahardja, Umar dan S.L. La Sulo. 2005. *Pengantar Pendidikan*. Jakarta : Rineka Cipta

T. Sulistyono, Drs. M. Pd. MM. 2003. *Wawasan Pendidikan Direktorat Pendidikan Lanjutan Pertama, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional*.

Utomo tjipto, Ruijter Kees. 1991. *Peningkatan dan Pengembangan Pendidikan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama